

Pentingnya Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Ranah Pendidikan pada Siswa

Anastasya Magdalena Putri Darmawan¹, Raja Oloan Tumanggor², Sherleen Sharkesyan³, Veronica Venesia⁴, Adeline Binarta⁵, Natasya Deasy Chandra⁶

^{1,2,3,4,5,6} Psikologi, Universitas Tarumanagara Jakarta

e-mail: anastasya.705210085@stu.untar.ac.id¹, rajat@fpsi.untar.ac.id²,
sherleen.705210066@stu.untar.ac.id³, veronica.705210084@stu.untar.ac.id⁴,
adeline.705210100@stu.untar.ac.id⁵, natasya.705210236@stu.untar.ac.id⁶

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih dalam apakah pembelajaran mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam ranah pendidikan pada siswa masih termasuk sebagai salah satu topik pembelajaran penting yang harus disampaikan dengan baik agar siswa dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literature review dengan sumber data dari enam jurnal penelitian dengan hasil sebagai berikut: (1) saat ini pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban masih tidak merata, (2) siswa sering merasa bosan dimana kolaborasi dengan berbagai pihak dan penerapan contoh konkret sangat penting untuk menjelaskan konsep tersebut, (3) terbukti bahwa dengan beberapa pendekatan metode belajar yang lebih menarik dan efektif seperti probing prompting learning dan talking stick dapat meningkatkan keterlibatan dan berpikir kritis siswa dalam memahami pelajaran mengenai hak dan warga negara.

Kata kunci: *Hak, Kewajiban, Warga Negara, Ranah Pendidikan, Siswa*

Abstract

This research seeks to investigate the significance of teaching citizens' rights and responsibilities in education. The objective is to determine whether this topic remains a pivotal aspect of the curriculum, essential for students to develop a comprehensive understanding of their roles as citizens. A literature review of six research journals was conducted to analyze existing studies on this subject. The findings revealed that: (1) students' grasp of their rights and responsibilities varies significantly, (2) the topic often fails to engage students, underscoring the need for collaborative efforts with various stakeholders and the use of concrete examples, and (3) the implementation of innovative teaching methods, including probing prompting learning and talking stick, has been shown to foster students' active participation and critical thinking in this area.

Keywords: *Rights, Responsibilities, Citizens, Educational Realm, Students*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari bangsa. Untuk memahami hal ini, seseorang harus terlebih dahulu mengerti apa yang dimaksud dengan warga negara (Tohir, 2022). Warga negara adalah penduduk suatu negara yang diakui berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan faktor lain, yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai anggota negara tersebut. Oleh karena itu, warga negara harus mematuhi semua aturan dan norma yang berlaku di Indonesia. Selain itu, peraturan juga dibuat untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga negara (Yunita & Dewi, 2021).

Warga negara juga berhak mendapatkan pemenuhan hak-haknya oleh negara. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam memastikan hak-hak tersebut terpenuhi, termasuk di bidang pendidikan (Yunita & Dewi, 2021). Peraturan yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan telah ditetapkan di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Tujuan

pendidikan di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Maharani et al., 2023).

Hak untuk memperoleh pendidikan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Pada ayat (3), dinyatakan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan yang layak, khususnya pendidikan dasar, yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi (Nadziroh et al., 2018).

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan pendidikan, seperti pemberian bantuan bagi siswa, angka putus sekolah tetap tinggi dan memprihatinkan. Pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah siswa putus sekolah mencapai 76.834 orang, dengan rincian 40.623 orang di tingkat SD, 13.716 orang di SMP, 10.091 orang di SMA, dan 12.404 orang di SMK (Rizqiyah, 2023). Tingginya angka putus sekolah di tingkat dasar dan menengah pertama disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana banyak orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka, serta pola pikir masyarakat yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari (Nadziroh et al., 2018).

Setiap warga negara, termasuk siswa, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara menyeluruh dari pemerintah dimanapun mereka berada. Perlindungan ini penting agar mereka dapat merasakan kenyamanan dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat kebangsaan maupun kenegaraan (Gaini et al., 2023). Selain itu, hak ini juga mencakup kebebasan untuk menyampaikan pendapat, yang memungkinkan individu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan negara. Sebagai warga negara, siswa memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan, bukan hanya sebagai bagian dari pembentukan diri mereka sendiri, tetapi juga sebagai kontribusi bagi pembangunan bangsa. Namun, ketika hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan akses yang merata belum sepenuhnya terpenuhi, kewajiban mereka untuk menempuh pendidikan menjadi semakin sulit untuk dipenuhi. Di sisi lain, sikap memandang rendah pendidikan menambah kompleksitas masalah ini, di mana siswa gagal memahami peran penting mereka dalam masyarakat sebagai generasi penerus yang diharapkan berkontribusi pada kemajuan negara.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi kunci penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipenuhi secara penuh agar mereka dapat menjalankan kewajiban mereka untuk bersekolah dengan baik. Tanpa akses yang memadai dan dukungan dari berbagai pihak, kewajiban untuk bersekolah akan terus diabaikan, dan siswa akan semakin jauh dari pemahaman tentang pentingnya pendidikan dalam memperkuat posisi mereka sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Hal tersebut juga memperlihatkan hubungan erat antara pemenuhan hak-hak siswa dan kesadaran mereka terhadap tanggung jawab sebagai warga negara. Akibatnya, pemahaman mengenai hak dan kewajiban juga belum sepenuhnya merata di kalangan siswa dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjalankan kewajiban mereka sebagai siswa sekaligus sebagai warga negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review. Metode ini didefinisikan sebagai metode untuk mengidentifikasi teori dan penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian yang dipilih dengan metodologi yang digunakan (Ridley, 2012). Peneliti mencari data penelitian melalui database Google Scholar mengenai pentingnya hak dan kewajiban warga negara dalam ranah pendidikan pada siswa dengan key terms "hak", "kewajiban", "ranah pendidikan", "pendidikan", "PPKn", "mahasiswa", "siswa", "warga negara". Data penelitian yang ditemukan dengan key terms tersebut akan dianalisis lebih dalam serta akan kami simpulkan secara menyeluruh. Data yang akan digunakan untuk mengkaji data penelitian lebih lanjut adalah judul penelitian, nama peneliti, kesimpulan, dan link dari data penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dimiliki oleh siswa belum sepenuhnya merata. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan respon siswa ketika ditanya mengenai apakah siswa merasa haknya dilindungi atau tidak. Sebagian siswa menjawab bahwa mereka merasa aman mengemukakan pendapat dan merasa haknya sebagai manusia sudah dilindungi. Sementara sebagian menjawab bahwa mereka merasa kurang aman dalam mengemukakan pendapat, dan hak atas perlindungannya kurang terpenuhi. Siswa juga masih kurang memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang tidak tertib lalu lintas dengan mengebut, padahal seharusnya siswa di bawah umur tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor dan belum memiliki surat izin mengemudi (Gaini et al., 2023).

Pengenalan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara harus dilakukan sejak dini. Pengenalan tersebut dilakukan pada siswa dengan harapan bahwa mereka dapat mengerti mengenai hak yang mereka dapatkan dan kewajiban yang harus mereka lakukan sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban dapat dikenalkan melalui pelajaran PKN di sekolah. Guru dapat menggunakan berbagai media yang kreatif agar siswa dapat lebih paham mengenai hak dan kewajibannya, serta menerapkan hak dan kewajiban tersebut di masyarakat nanti (Haifarashin et al., 2021).

Walaupun terlihat mudah, pengenalan hak dan kewajiban sebagai warga negara kepada siswa melalui pelajaran dapat menjadi kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh metode yang kurang konvensional dan tidak interaktif. Hasilnya, siswa dapat merasa bahwa pelajaran ini membosankan, kemudian menjadi tidak fokus pada pelajaran, dan akhirnya tidak memahami mengenai hak dan kewajiban warga negara. Sekolah diharapkan dapat membuat cara yang kreatif seperti simulasi yang melibatkan partisipasi masyarakat agar seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran yang menyenangkan. Peluang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban warga negara di masa ini cukup besar karena adanya berbagai media teknologi yang dapat dijadikan sarana pembelajaran. Untuk memastikan siswa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua. Kolaborasi ini diperlukan agar siswa dapat secara langsung memberikan contoh nyata terkait pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Mahmudah et al., 2020).

Pendidikan kewarganegaraan (PKN) bukan hanya sebagai mata pelajaran formal, namun juga sebagai landasan penting bagi siswa agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pembelajaran PKN terhadap mahasiswa FIS Unimed dalam memahami hak dan kewajiban sudah berjalan dengan baik dikarenakan mereka dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik. Meskipun mahasiswa FIS Unimed umumnya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, masih terdapat berbagai kendala yang mereka hadapi dalam menerapkan pemahaman tersebut. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai sistem politik dan negara, serta siswa yang seringkali masih kurang memperhatikan isu sosial dan politik. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan partisipasi aktif secara langsung ke masyarakat, pembelajaran langsung, dan meningkatkan literasi dengan memanfaatkan platform digital. Selain itu, perlunya merancang strategi pembelajaran PKN yang lebih optimal agar membantu mahasiswa lebih memahami dan menjalankan peran mereka sebagai warga negara. (Ramadhani et al., 2023).

Prestasi belajar siswa yang rendah, serta siswa kurang aktif dalam memperhatikan pembelajaran masih seringkali terjadi. Salah satu kendala yang ditemukan adalah siswa tidak berani dalam mengungkapkan pendapat. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, diperlukannya metode pembelajaran yang baru dan berbeda oleh guru sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berpendapat. Selain itu, metode pembelajaran yang menarik juga dapat membuat siswa tidak mudah merasa bosan sehingga proses belajar mengajar mata pelajaran PPKn dapat menjadi lebih efisien. Metode pembelajaran yang digunakan adalah *probing prompting learning*, 'probing' yaitu menyelidiki lebih dalam dan *prompting* yaitu memberikan petunjuk. Sehingga dalam metode ini, guru memberikan serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun dan menggali kemampuan berpikir siswa. Dengan begitu, siswa dapat menghubungkan apa yang sudah diketahui dengan hal-hal baru yang sedang dipelajari. Siswa menjadi dapat membangun

pemahaman sendiri tentang konsep, aturan, dan prinsip-prinsip penting. Dalam menerapkan metode tersebut, diperlukan perencanaan terlebih dahulu untuk merancang pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan metode probing prompting learning, melakukan observasi dalam proses pembelajaran, dan melakukan refleksi mengenai proses pembelajaran agar mencapai target. (Alawiyah & Akrom, 2016).

Proses pembelajaran di kelas masih didominasi oleh metode ceramah dan tanya jawab dari guru, serta minimnya pemanfaatan media pembelajaran. Kondisi tersebut membuat sebagian besar siswa merasa bosan, terutama dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Kurangnya variasi dalam metode dan gaya mengajar guru yang belum maksimal dalam memfasilitasi siswa, seringkali membuat siswa menjadi kurang antusias, bersikap pasif dan tidak fokus dalam belajar. Metode pembelajaran menggunakan talking stick berbentuk media papan bergambar dianggap efektif dalam meningkatkan minat siswa pada mata pelajaran PPKn. Talking Stick adalah model pembelajaran yang memanfaatkan permainan tongkat untuk menilai kemampuan siswa dalam suatu mata pelajaran. Dalam metode ini, tongkat dipindahkan secara bergantian di antara siswa sambil diiringi musik, yang bertujuan untuk memotivasi siswa agar berani menyampaikan argumen. Siswa yang terakhir memegang tongkat diwajibkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Metode pembelajaran ini dianggap efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Metode pembelajaran tersebut juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pada mata pelajaran selain PPKn (Rifkiyani et al., 2023).

Tabel 1. Kesimpulan artikel jurnal

Judul	Author	Kesimpulan	Link
Pemahaman Siswa tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara	Ridha Haifarashin, Yayang Furi Furnamasari, Dinie Anggraeni Dewi	Pengenalan hak dan kewajiban warga negara harus dikenalkan sejak dini kepada siswa melalui pelajaran PKN, dan sistem pembelajaran yang kreatif agar siswa dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.	https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2135
Membangun Kesadaran Sipil: Integritas Pendidikan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kurikulum Sekolah	Fitri Zakiyah Mahmudah, Julia Nur Abidah, Nanda Anggria Rahayu, M. Aripin Ilham, MahaPutra	Pembelajaran hak dan kewajiban kepada siswa tidak mudah dilakukan karena siswa dapat merasa bosan. Diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak untuk memberikan contoh nyata tentang hak dan kewajiban warga negara agar siswa dapat dengan mudah memahami hak dan kewajibannya.	https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v5i1.242
Realisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara di Kalangan Pelajar dan Penerapannya di Kehidupan Sehari-hari	Nitha Gaini, Rifki Putra Nugraha, Ruri Hendawati Agustin, Syifa Jeni Putri	Pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara masih kurang merata. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jawaban mengenai haknya dan kewajibannya yang kurang dipenuhi.	https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.39
Analisis peran PKN Terhadap Mahasiswa FIS Unimed dalam Memahami Hak dan Kewajiban Sebagai Warga	Kania Nova Ramadhani, Esra Natasya Br Sitepu, Gadis Prasiska Sembiring, Al Firman	Pengenalan PPKn terhadap mahasiswa FIS Unimed dalam memahami hak dan kewajiban berjalan dengan lancar dikarenakan adanya pembelajaran mendalam utama mengenai sistem hukum dan politik negara agar mahasiswa dapat melihat langsung	https://doi.org/10.51903/bersatu.v1i6.481

Negara	Mangunsong, Ramsul Nababan	bagaimana sistem tersebut berjalan.	
Meningkatkan Prestasi Belajar PPKn Pada Materi Memahami Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Melalui Pendekatan <i>Probing Prompting Learning</i>	Tuti Alawiyah, Akrom	Peningkatan prestasi belajar PPKn untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara berjalan dengan lancar dengan pendekatan <i>probing prompting learning</i> dimana siswa aktif dalam menjawab dengan pikiran yang kritis.	https://ftk.uinbante.n.ac.id/journals/index.php/primary/article/view/149
Keefektifan Model Talking Stick Terhadap Keaktifan Belajar Siswa pada Pembelajaran PPKn Materi Hak dan Kewajiban	Putri Rifkiyani, Emiliana Catherine Corneliesta, Susilo Tri Widodo, Ibtidaiyah	Pembelajaran dengan model <i>talking stick</i> efektif digunakan dalam studi PPKn mengenai hak dan kewajiban dimana siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran.	https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6389

SIMPULAN

Hasil kajian mengenai pentingnya hak dan kewajiban warga negara dalam ranah pendidikan pada siswa dapat ditarik kesimpulan bahwa pengenalan hak dan kewajiban warga negara kepada siswa harus dilakukan sejak dini melalui pelajaran PPKn dengan metode yang inovatif untuk meningkatkan pemahaman. Meskipun siswa sering merasa bosan, kolaborasi dengan berbagai pihak dan penerapan contoh konkret sangat penting untuk menjelaskan konsep tersebut. Saat ini, pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban masih tidak merata, menunjukkan perlunya strategi tambahan. Di sisi lain dalam perguruan tinggi, mahasiswa yang diberikan pembelajaran mendalam tentang sistem hukum dan politik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara berhasil mengerti dimana mereka memiliki pemahaman yang lebih matang.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memungkinkannya untuk menggunakan beberapa pendekatan dengan metode belajar lain yang lebih menarik dan efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan berpikir kritis siswa maupun mahasiswa dalam pembelajaran PPKn, membuat proses belajar lebih dinamis karena terbukti dengan metode pembelajaran tersebut, siswa maupun mahasiswa dapat lebih mengerti topik yang diberikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih baik secara langsung maupun tidak langsung kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Terlebih, untuk Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara yang telah memberi kami kesempatan dengan mengadakan penelitian ini di dalam mata kuliah humaniora. Selain itu, tim pelaksana juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raja Oloan Tumanggor atas segala materi dan bimbingan yang diberikan terkait dengan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alawiyah, T., & Akrom, A. (2016). Meningkatkan prestasi belajar PPKn. pada materi memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui pendekatan *probing prompting learning*. Primary: Jurnal Keilmuan dan Kependidikan Dasar, 8(1), 93-106.

- Gaini, N., Nugraha, R. P., Agustin., R. H., & Putri, S. J. (2023). Realisasi hak dan kewajiban warga negara di kalangan pelajar dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4). <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.39>
- Haifarashin, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pemahaman siswa tentang kewajiban dan hak warga negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7261–7265. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2135>
- Maharani, A., Wirayudha, A. S., & Firdausi, A. P. R. (2023). Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya meningkatkan karakter mahasiswa. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2(3), 2746-3662.
- Mahmudah, F. Z., Abidah, J. N., Rahayu, N. A., Ilham, M. A., & Putra, M. (2024). Membangun kesadaran sipil: Integritas pendidikan hak dan kewajiban warga negara dalam kurikulum sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(1), 332–336. <https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v5i1.242>
- Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, W. (2018). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar di indonesia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 4(3), 400-405.
- Ramadhani, K. N., Sitepu, E. N. B., Sembiring, G. P., Mangunsong, A. F., & Nababan, R. (2023). Analisis peran PKN terhadap mahasiswa FIS Unimed dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(6), 293-300.
- Rizqiyah, A. (2023, November 13). Gender gap di indonesia, angka putus sekolah didominasi oleh laki-laki. *Goodstats*. Gender Gap di Indonesia, Angka Putus Sekolah Didominasi oleh Laki-Laki - GoodStats
- Rifkiyani, P., Corneliesta, E. C., & Widodo, S. T. (2023). Keefektifan model talking stick terhadap keaktifan belajar siswa pada pembelajaran PPKn materi hak dan kewajiban. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 3771-3780.
- Tohir, S. (2022). Mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Kotamo*, 2(1), 2000-0927.
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 429–436. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.274>